

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik India atau yang lebih dikenal dengan nama India, merupakan negara yang terletak di wilayah Asia Selatan. India berbatasan dengan Pakistan di sebelah barat; Bhutan, RRT, dan Nepal di sebelah utara; serta Bangladesh dan Burma di sebelah timur. Pulau terluar India, Andaman dan Nicobar, berbatasan dengan pulau Sumatera, Indonesia. India memiliki luas wilayah sebesar 3.287.590 km² dengan populasi kurang lebih 1,2 milyar jiwa. (Kementerian Luar Negeri Indonesia)

Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama Indonesia, merupakan negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. (Kementerian Sekretariat Republik Indonesia, 2018) Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan luas wilayah sekitar 9,804,569 km² dan populasi lebih dari 263.846.946 jiwa.

Hubungan antara India dengan Indonesia sudah terjalin lama semenjak sebelum Indonesia merdeka. Ikatan kedua negara dimulai ketika para pedagang dari India masuk ke Indonesia. Pedagang – pedagang dari India tersebut sembari berdagang mereka menyebarkan ajaran agama Hindu dan kebudayaan – kebudayaan India. Salah satu contoh penting pengaruh India di Indonesia yaitu candi Borobudur dan Prambanan. Kemudian pada saat pembentukan negara Indonesia, India merupakan salah satu dari beberapa negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia. Kedekatan

ini yang kemudian mempengaruhi terbentuknya hubungan diplomatik antara India dengan Indonesia.

Hubungan diplomatik antara India dengan Indonesia dapat dilihat ketika kedua negara yang pada saat itu dipimpin oleh Jawaharlal Nehru dan Soekarno bersama-sama mendukung kemerdekaan negara – negara Asia dan Afrika dengan membentuk sebuah gerakan non-blok pada Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Selanjutnya pada tahun 1991, ketika Indonesia mengadopsi kebijakan “*Look East*”, hubungan diplomatik kedua negara berkembang pesat di sektor politik, ekonomi, pariwisata, dan budaya.

Dalam sektor ekonomi, India dan Indonesia bekerjasama dalam bidang perdagangan dan investasi. Untuk bidang perdagangan, komoditi yang diekspor India ke Indonesia yaitu produk minyak bumi, kendaraan bermotor, peralatan dan suku cadang telekomunikasi, pertanian, serta produk baja dan plastic. Untuk bidang investasi, India memiliki investasi besar di Indonesia dalam bidang otomotif, perbankan, serta tekstil dan baja.

Walaupun India dan Indonesia memiliki budaya yang berbeda dan beragam, kedua negara memiliki kesamaan budaya dan nilai-nilai, seperti ajaran-ajaran Hindu yaitu Ramayana dan Mahabharata sangat dikenal di Indonesia serta musik dangdut yang sangat populer di Indonesia dipengaruhi oleh musik Hindustani. Fakta ini kemudian membuat India mempromosikan budayanya di Indonesia. *Jawaharlal Nehru Indian Culture Center* didirikan di Jakarta pada tahun 1989 untuk memperkenalkan bahasa Hindia dan Tamil serta mempromosikan budaya India seperti musik klasik India, tarian klasik India, dan Yoga. (Ministry of External Affairs, 2017)

Melihat jumlah wisatawan India yang cukup tinggi, Indonesia sepakat meningkatkan kerjasama pariwisata dengan India. Pada tahun 2010, pemerintah India dan Indonesia melalui delegasi Shri Khwaja dan Wardiyatmo menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang kerjasama pariwisata.

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan saat pertemuan *2nd Joint Working Group*, guna mempromosikan pariwisata dan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan wisatawan dan program kemitraan yang akan dikembangkan antara lembaga akademik di sektor pariwisata kedua negara. (Ministry of Tourism, 2010)

Seiring berjalannya waktu, India tidak hanya membangun hubungan kedua negara dalam kerjasama-kerjasama seperti dalam sektor perekonomian dan pertukaran budaya. India kemudian ingin mengeksplor potensi pariwisata dengan Indonesia. India merupakan negara yang dikenal sebagai negara yang memiliki beragam warisan budaya, makanan, seni, arsitektur, candi, serta festival dan pameran menjadikan India destinasi wisata yang menarik wisatawan. India menawarkan berbagai destinasi wisata yaitu pantai yang indah, hutan dan margasatwa, pemandangan yang indah, salju, sungai, puncak gunung, taman teknologi dan museum ilmu pengetahuan, pusat ziarah. Selain beragam destinasi pariwisata, India juga memiliki beragam jenis perhiasan, karpet, dan barang-barang terbuat dari kulit menjadi barang yang diburu para wisatawan. Keberagaman destinasi wisata yang ditawarkan India ini membuat India banyak dikunjungi oleh wisatawan domestic maupun mancanegara.

Pariwisata adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi dan sumber lapangan pekerjaan & pendapatan devisa di banyak negara, termasuk India. Pariwisata memiliki kapasitas yang besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan jenis yang beragam, dari jenis pekerjaan yang tidak trampil maupun yang memiliki keterampilan. (Ministry of Tourism India, 2018) Pembangunan sektor pariwisata tidak hanya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial negara namun juga akan berdampak baik terhadap hubungan antar negara. Salah satu cara untuk merealisasikan potensi pariwisata yaitu dengan menyederhanakan prosedur kunjungan.

Untuk dapat melakukan kunjungan ke India, dibutuhkan sebuah paspor dan visa sebagai dokumen resmi yang wajib dimiliki. Paspor adalah dokumen resmi sebagai identitas warga negara yang memuat data seperti nama, kewarganegaraan, alamat, dan data pribadi lainnya. Sementara, visa adalah izin legal yang dikeluarkan oleh perwakilan negara untuk mengizinkan seseorang untuk memasuki dan menetap di negara mereka dalam jangka waktu tertentu. Visa memiliki banyak jenis yang dapat digunakan tergantung dengan tujuan perjalanan dan juga jangka waktu untuk menetap. Secara umum, jenis visa yang digunakan oleh warga negara asing adalah visa *short-term stay* (pariwisata, kunjungan bisnis, kunjungan teman atau keluarga), visa kerja, dan visa *long-term stay* (pendidikan, kesehatan, pekerjaan), dan visa diplomatik. (Sandy, 2016)

Seperti yang tertulis pada *The Passport (Entry into India) Act* tahun 1920, semua warga negara asing yang ingin memasuki negara India harus memiliki dokumen perjalanan atau paspor. Selain itu, dibawah peraturan ini, warga negara asing yang datang/masuk ke India diharuskan untuk mendapatkan visa dari perwakilan India. (Ministry of Home Affairs) Peraturan ini harus dipatuhi oleh semua warga negara asing yang ingin berkunjung atau memasuki negara India, termasuk warga negara Indonesia.

Sebelumnya, India masih memberlakukan kebijakan visa berbayar kepada warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke negara India dengan mengajukannya langsung ke kedutaan besar India. Namun, pada tanggal 30 Mei 2018, Perdana Menteri India mengumumkan untuk memberikan warga negara Indonesia bebas biaya e-visa hingga 30 hari yang kemudian kebijakan ini mulai diberlakukan pada tanggal 20 Juni 2018. (CNN Indonesia, 2018) Namun, pemegang paspor Indonesia yang ingin berkunjung ke India sebelumnya harus mengajukan e-visa tanpa dipungut biaya melalui situs resmi e-Visa India. Jenis e-Visa yang dapat diajukan pemohon yaitu *e-tourist*, *e-business*, dan *e-medical*. E-Visa ini digunakan untuk masuk ke

India melalui 25 bandar udara dan 5 pelabuhan laut. (The Jakarta Post, 2018)

Pembebasan biaya e-visa kepada warga negara Indonesia ini menandakan bahwa pemerintah India memperbolehkan warga negara Indonesia untuk berkunjung ke India hingga 30 hari. Dengan hal ini, pemerintah India memudahkan warga negara Indonesia untuk berkunjung ke India selama 30 hari tanpa dikenakan biaya saat mengajukan e-Visa.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, timbul pertanyaan, “Mengapa Pemerintah India memberikan bebas biaya e-visa kepada warga negara Indonesia pada tahun 2018?”

C. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan penelitian ini, penulis menggunakan dua kerangka pemikiran yaitu, model aktor rasional dan konsep kepentingan nasional. Model aktor rasional diambil dari tiga model pembuatan keputusan politik luar negeri oleh Graham T. Allison. Untuk menjelaskan proses pembuatan keputusan luar negeri, Graham T. Allison mengajukan tiga model yaitu Aktor Rasional, Proses Organisasi, dan Politik Birokratis. Namun dari ketiga model tersebut, penulis dalam penelitian ini menggunakan menggunakan model aktor rasional. Selain model aktor rasional, penulis juga menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai kerangka pemikiran untuk menjelaskan pokok permasalahan dari penelitian ini.

1. Aktor Rasional

Dalam model ini, politik luar negeri dilihat sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional untuk mencapai suatu tujuan. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini, individu berusaha menentukan pilihan atas alternatif-alternatif

yang ada. Unit analisa model pembuatan keputusan ini adalah pilihan yang diambil oleh pemerintah. Analisa politik luar negeri harus difokuskan pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternative haluan kebijaksanaan yang bisa diambil, dan perhitungan untung-rugi dari altertaif-alternatif yang diambil. (Mas'oad, 1994)

Para pembuat keputusan digambarkan sebagai individu yang selalu siap untuk melakukan perubahan maupun penyesuaian dalam menentukan keputusan yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Dalam model ini, para pembuat keputusan dan keputusan-keputusan yang diambil (terutama yang menyangkut politik luar negeri) dianggap rasional. (Mas'oad, 1994)

Dalam proses pembuatan kebijakan, para pembuat keputusan dihadapkan dengan berbagai pilihan kebijakan untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Setiap pilihan kebijakan memiliki konsekuensi atau hasil yang berbeda dan sebagai aktor rasional, pemerintah akan memilih kebijakan yang memiliki konsekuensi atau hasil tertinggi yang dimana maksud dari konsekuensi ini yaitu keuntungan. (Allison, 1971)

Tabel 1.1 Analisis Pemberian Bebas Biaya E-Visa kepada Warga Negara Indonesia

Indikator	Memberikan Bebas Visa E-Visa kepada Warga Negara Indonesia		Tidak Memberikan Bebas Biaya E-Visa kepada Warga Negara Indonesia	
	Untung	Rugi	Untung	Rugi
Sektor Pariwisata	Menambah kunjungan wisatawan Indonesia	Tidak ada kerugian yang didapat	Tidak ada keuntungan yang didapat	Rendahnya kunjungan wisatawan Indonesia karena sulitnya mengurus visa
Sektor Ekonomi	Meningkatkan pendapatan ekonomi India	Berkurangnya pendapatan devisa	Negara tetap menerima pendapatan devisa dari masuknya wisatawan	Minimnya pendapatan yang diterima dari wisatawan yang berkunjung
Aliansi	Mempererat hubungan antar kedua negara	Tidak ada kerugian yang didapat	Tidak ada keuntungan yang didapat	Kemungkinan tidak adanya peningkatan hubungan kerjasama

Jika dikaitkan dengan pokok permasalahan penelitian ini, Perdana Menteri merupakan aktor penting dalam penyusunan kebijakan politik luar negeri di India. Dalam hal ini, Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India berantusias ingin mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat India melalui sektor pariwisata dan menambah wisatawan asing berkunjung ke India. (Bharatiya

Janata Party, 2014) Hal ini mendorong pemerintahan India untuk memutuskan memberlakukan bebas biaya e-Visa kepada warga negara Indonesia. Karena dengan adanya e-visa gratis, kepentingan-kepentingan Narendra Modi untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan keinginan untuk mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi India dapat tercapai.

2. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan acuan oleh para pengambil keputusan dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional seringkali digunakan sebagai alat untuk menganalisis politik luar negeri suatu negara. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam suatu negara dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum dari elemen-elemen yang menjadi kebutuhan yang vital bagi suatu negara. (Plano & Olton, 1988)

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, ada lima elemen-elemen penting yang menjadi tujuan serta faktor yang mendasari para pembuat keputusan dalam membentuk politik luar negeri, yaitu:

- 1) *Self Preservation* yaitu hak untuk mempertahankan diri
- 2) *Independence* yaitu hak untuk mandiri dan tidak dijajah
- 3) *Military Security* yaitu keamanan negara dengan militer
- 4) *Territorial Integrity* yaitu keutuhan wilayah
- 5) *Economic Wellbeing* yaitu kesejahteraan ekonomi

Dari lima elemen penting diatas, penulis beranggapan bahwa *economic wellbeing* adalah elemen yang paling tepat untuk menjelaskan permasalahan mengenai latarbelakang

pemerintah India memberikan bebas biaya e-visa kepada warga negara Indonesia pada tahun 2018.

Ekonomi merupakan elemen penting dalam kepentingan nasional. Setiap negara mempunyai tujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi negaranya. Sebagai negara berkembang, India sedang dihadapkan dalam fase proses pertumbuhan ekonomi. Pemerintah India sendiri berambisi untuk membangun perekonomian negara, salah satunya melalui sektor pariwisata. Dengan membangun sektor pariwisata, India dapat mendorong terciptanya kesejahteraan ekonomi. Salah satu langkah untuk mencapai pembangunan ekonomi negara yaitu melalui pemberian bebas biaya e-visa kepada warga negara Indonesia. Dengan pemberian bebas biaya e-visa kepada warga negara Indonesia, pemerintah India dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke India, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi sehingga dapat meningkatkan kualitas sosial masyarakat Indi, serta menjaga dan mempererat hubungan dengan Indonesia.

Melalui pemberian e-visa bebas biaya kepada warga negara Indonesia, pemerintah India dapat mencapai kepentingan nasional negara. Dengan pemberian bebas biaya e-visa, India tidak hanya dapat menarik wisatawan untuk berkunjung, namun juga mendorong perekonomian dan kualitas sosial masyarakat India melalui kungjungan wisata, serta kebijakan ini dapat mempererat hubungan India dengan Indonesia.

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian dari kerangka teori, dapat ditarik hipotesis bahwa pemerintah India memberikan bebas biaya e-visa kepada warga negara Indonesia untuk mendongkrak kunjungan wisatawan, mendongkrak pertumbuhan sosial dan ekonomi negara, serta untuk mempererat hubungan India-Indonesia.

E. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, fokus utama dari penulis ialah untuk menguraikan kebijakan bebas biaya e-visa kepada warga negara Indonesia oleh pemerintah India dan mengidentifikasi hal – hal yang melatarbelakangi diterapkannya kebijakan bebas biaya e-visa kepada warga negara Indonesia oleh pemerintah India yang dilihat dari sudut pandang negara India. Periode waktu dalam penelitian ini yaitu tahun 2018 ketika Perdana Menteri India mengumumkan untuk memberlakukan bebas biaya e-visa hingga 30 hari kepada warga negara Indonesia. Penulis menggunakan data dan fakta yang diambil pada tahun 2018 maupun sebelum tahun 2018 untuk memperkuat analisis selama itu relevan dengan topik penelitian.

F. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Sumber data diperoleh melalui buku-buku perpustakaan, jurnal, majalah, dan artikel – artikel di internet yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Penjelasan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Pembahasan mengenai pariwisata India dan hubungan bilateral India dengan Indonesia

Bab III. Penjelasan mengenai kebijakan e-visa India.

Bab IV. Penjelasan mengenai motif pemerintah India memberikan bebas visa kepada warga negara Indonesia pada

tahun 2018 menggunakan model aktor rasional dan konsep kepentingan nasional.

Bab V. Kesimpulan